

ABSTRAK

Kantor Staf Presiden merupakan unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden. Pembentukan ini bertujuan untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan dalam beberapa kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program nasional. Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden. Staff Kepresidenan terdiri dari anak muda berusia antara 23-36 Tahun. Berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun Tahun 2015 Staf tersebut akan mendapatkan Hak bulanan sebesar 51 Juta. Pembentukan KSP ini bertujuan untuk memberi dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program antara lain adalah prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis.

Adapun tinjauan pustaka yang digunakan adalah dengan menggunakan Teori Kewenangan, Teori Organ dan Lembaga Negara, teori tersebut bahan dasar pada penyelenggaraan pemerintah dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Dengan adanya Kantor Staf Presiden yang memungkinkan kinerja dan program-program dari Presiden dan Wakil Presiden berjalan baik dan lancar.

Kata Kunci: Kantor Staf Presiden, Menteri Koordinator, Tumpang tindih

ABSTRACT

The Presidential Staff Office is a unit of the Presidential Staff, which was formed by Presidential Regulation Number 26 of 2015 concerning Presidential Staff Office. This formation aims to provide support to the President and Vice President in controlling several strategic activities, namely the implementation of national programs. Presidential Staff Unit which was formed based on Presidential Decree Number 26 of 2015 concerning Presidential Staff Office. The Presidential staff consists of young people aged 23-36 years. Based on the Presidential Regulation No. 144 of 2015, the staff will get a monthly entitlement of 51 million. The establishment of the KSP aims to provide support to the President and Vice President in controlling the implementation of three strategic activities, namely the implementation of programs including national priorities and management of strategic issues.

The literature review used is to use the theory of State Authority, Organs and Institutions, this theory is the basic ingredient of government administration and thinking about organizing power regarding state organizations in very rapidly developing countries. With the Presidential Staff Office, which allows the performance and programs of the President and Vice President to run well and smoothly.

Keywords: Presidential Staff Office, Coordinating Minister, Overlapping

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keberadaan Kantor Staf Presiden Dalam Struktur Lembaga Kepresidenan”** Sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kehadiran baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kejahilian menuju alam yang terang benderang seperti yang penulis rasakan saat ini.

Penyusunan skripsi ini dibuat untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang telah menyemangati dan mendo'akan saya
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani,SH., M.Hum beliau selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
3. Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H beliau selaku Dosen Pembimbing dalam Skripsi ini, beliau telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal pembuatan Proposal Skripsi ini sampai dengan Tugas Akhir atau Skripsi.
4. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Trunjoyo Madura.
5. Terimakasih untuk teman-teman, terutama Ilham Julianto dan Nurul Latifa yang telah ikut andil dalam pembuatan Skripsi ini, tak luput juga Miftahus surur (oyonk), Stifani Teressa Berliana, Arif Wicaksono.
6. Dan seluruh pihak yang terkait dalam proses penyusunan Skripsi.

Besar harapan penulis, mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat sehingga dapat menambah pengetahuan terhadap diri Penulis Pribadi dan dapat memberi wawasan terhadap Mahasiswa Fakultas Hukum. Manakala pembuatan Tugas Akhir atau Skripsi ini terdapat kekurangan mohon saran dan kritik yang membangun d

emi kesempurnaan Skripsi ini. Terimakasih atas Do'a dan dukungannya selama ini.

Bangkalan, Januari 2021

Aldo Meizulmi Arsy

NIM. 160111100213

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN.....	4
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1. Latar Belakang Masalah.....	10
1.1 Rumusan Masalah	18
1.2 Tujuan Penulisan	18
1.3 Kegunaan Penelitian.....	18
1.3.1 Kegunaan Teoritis :.....	19
1.3.2 Kegunaan Praktis :	19
1.4 Keaslian Penelitian	19
1.5 Metode Penelitian.....	22
a. Jenis Penelitian	22
b. Pendekatan Penelitian.....	23
c. Sumber Bahan Hukum	23
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	24
e. Analisis Bahan Hukum.....	24
1.6. Sistematika Penulisan	25
BAB II PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT DENGAN KEBERADAAN KANTOR STAF PRESIDEN DI INDONESIA.....	26
2.1 Pengertian Fungsionalitas.....	26
2.2 Pengertian Staf Presiden.....	31
2.3 Pengertian Lembaga Menurut Ahli	34
2.4 Teori Kewenangan	36
2.5 Teori Organ Dan Lembaga Negara	41
BAB III PEMBENTUKAN KANTOR STAF PRESIDEN DAN TUMPANG TINDIH DENGAN LEMBAGA NEGARA LAIN.....	45

3.1 Pembentukan Kantor Staf Presiden Berdasarkan Prespektif Hukum Tata Negara Indonesia	45
3.1.1 Keahlian Kantor Staf Presiden Dalam Melaksanakan Fungsi Ketatanegaraan di Indonesia	48
3.1.2 Prespektif Kantor Staf Kepresiden Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia	56
3.2 Tumpang Tindih Kewenangan Kantor Staf Presiden Dengan Lembaga Negara Lain	57
3.2.1 Keberadaan atau Peran Lembaga Kantor Staf Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia	60
3.2.2 Keberadaan atau Peran Lembaga Koordinator Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia	64
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2. Saran	69